

**Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

**Di Kabupaten Bantaeng**

**TRI ALMAIDAH (1292142016)**

**Jurusan Akuntansi S1**

**Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Azis, M.Si**

**Pembimbing 2 : Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M.Si.**

**ABSTRAK**

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantaeng.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi dalam penelitian ini adalah data Penerimaan PAD Lingkup SKPD Kabupaten Bantaeng. dan sampelnya adalah data Penerimaan PAD Lingkup SKPD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2008-2015. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**ABSTRACT**

Effects of Regional Taxes and Regional Levies on Regional Original Revenues (PAD) in Bantaeng District.

This study aims to determine the effect of regional taxes and regional levies partially and simultaneously on Regional Original Income (PAD). The population in this study is data on the receipt of PAD in the scope of the Bantaeng District SKPD. and the sample is data on the receipt of PAD in the scope of Bantaeng District SKPD for the fiscal year 2008-2015. Data collection is done by documentation techniques. The analysis technique used is multiple linear regression analysis.

Keywords: Regional Tax, Regional Retribution and Regional Original Revenue (PAD)

**PENDAHULUAN.**Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah

terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah PAD karena merupakan sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah, pengertian PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD itu sendiri bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana komponen utama PAD adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU no 34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU no 28 tahun 2009. Yang mana sesuai dengan undang-undang tersebut, pajak daerah terbagi atas dua yaitu pajak daerah tingkat I (provinsi) dan pajak daerah tingkat II (kabupaten/kota). Dimana pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung

walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Adapun peraturan pemerintah tersebut menetapkan jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dimana retribusi jasa umum terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. sedangkan retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terus mengalami peningkatan diberbagai sektor seperti peningkatan penduduk, objek wisata, dan tempat hiburan. Hal ini menjadikan kabupaten Bantaeng memiliki banyak kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah cukup besar yang bersumber dari sektor perdagangan, hotel, restoran dan penerimaan lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan atas, maka penulis menjadi menarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantaeng”.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arifuddin; Kusumawati, Andi. 2015. *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LeutikaPrio.

- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah: Teori*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irwadi, Maulana. 2019. *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Kebijakan Perpajakan Daerah..* Skripsi FE UNDIP.
- Isroy, Antony. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang*. Skripsi STIA LAN.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Priyanto, Dwi. 2014. *SPSS 22 Pengelolaan Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, Siti Kurnia; Suhayati, Ely. 2010. *Perpajakn Indonesia, Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Negara Republik Indonesia
- Riduansyah, Mohammad. 2011. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*. Skripsi Universitas Negeri Surabaya.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali. Jakarta.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Wahid. 2004. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS, Contoh Kasus dan Pemecahannya*. Yogyakarta: Andi.
- Sulistiyowati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Skripsi FE UNDIP.
- Suryarini, Trisni; Tarmudji, Tarsis. 2012. *Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

\_\_\_\_\_. 2015. *Perpajakan Indonesia, Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.